

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK HUTANG
PIUTANG DENGAN TAMBAHAN PEMBAYARAN SEBAGAI
JASA DI DESA SRUNI KECAMATAN GEDANGAN
KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

OLEH

IRMA AGUSTIN

NIMC02215030



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irma Agustin

NIM : C02215030

Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum
Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang
Piutang Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa
di Desa Sruri Kecamatan Gedangan Kabupaten
Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya
sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Juli 2019

Saya yang menyatakan,




NIM. C02215030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Irma Agustin,
NIM C02215030 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 02 Juli 2019

Pembimbing,



Drs. Sunarkan, M. Ag
NIP. 196408101993031002

PENGESAHAN

Proposal yang ditulis oleh Irma Agustin NIM. C02215030 ini telah dipertahankan didepan Seminar Proposal/Ujian Proposal Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 24 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Seminar/Ujian Proposal Skripsi :

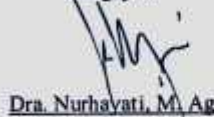
Penguji I



Drs. Sunarko, M. Ag

NIP. 196408101993031002

Penguji II



Dra. Nurhayati, M. Ag

NIP. 196806271992032001

Penguji III



Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I

NIP. 197104172007101004

Penguji IV



Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH

NIP. 198905172015031006

Surabaya, 24 Juli 2019


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,



H. Masruhan, M. Ag

NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Irma Agustin
NIM : C02215030
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail : irmaagustin160897@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK HUTANG PIUTANG DENGAN
TAMBAHAN PEMBAYARAN SEBAGAI JASA DI DESA SRUNI KECAMATAN
GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Agustus 2019

Penulis


Irma Agustin

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang dengan Tambahan Pembayaran sebagai Jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo” dimana penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai : bagaimana praktik hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni, Gedangan, Sidoarjo ? dan, bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni, Gedangan, Sidoarjo ?

Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi bersama pihak yang terkait, yaitu dengan ketua Gapoktan sebagai pemberi hutang (*muqrid*) dan dengan penerima hutang (*muqtarid*). Selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Dimana penelitian ini menganalisis dari dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis mengenai *qard* (hutang-piutang) dan Riba.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa :*pertama*, praktik hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, dimana praktik tersebut telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam akad *qardh* yaitu *shighat*, '*aqidain* serta ketentuan terhadap harta yang dihutangkan. *Kedua*, praktik hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dalam hukum Islam. Meski kedua belah pihak telah sama-sama mengetahui tentang adanya ketentuan tambahan pembayaran hutang dan kedua belah pihak saling ridha, artinya kedua belah pihak melakukannya dengan rasa saling suka sama suka (*antaradin*), tetapi hal tersebut mengandung adanya unsur riba, yaitu riba *qardh* yang dilarang dalam Islam, yang sesuai dengan "*Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa ar riba*" yang artinya Setiap pinjaman atau hutang piutang (*qardh*) yang mengalirkan atau mensyaratkan adanya kelebihan dalam pengembaliannya, maka termasuk dalam kategori riba.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka bagi anggota-anggota yang terdaftar di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang melakukan transaksi tersebut harus lebih memperhatikan prinsip-prinsip yang ada dalam Islam serta bagi pengurus-pengurus yang ada agar bisa mencari pemasukan yang lain misalnya, membuka usaha seperti menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh anggota-anggotanya.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitan	15
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II HUTANG PIUTANG (<i>QARD</i>) DAN RIBA	
A. Hutang Piutang (<i>qard</i>)	23
1. Definisi Hutang Piutang (<i>qard</i>)	23
2. Landasan Hukum	25
3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i> }.....	27
4. <i>Qard</i> /Yang Mendatangkan Keuntungan	28
5. Tambahan Dalam Pengembalian Pembayaran Hutang	30
B. Riba	32

**BAB III PRAKTIK HUTANG PIUTANG DENGAN TAMBAHAN
PEMBAYARAN SEBAGAI JASA DI DESA SRUNI KECAMATAN
GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO**

A. Gambaran Umum Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.....	44
B. Profil Perkumpulan Gapoktan Unggul Makmur.....	47
1. Sejarah perkumpulan gapoktan unggul makmur	47
2. Syarat-syarat menjadi anggota gapoktan unggul makmur.....	50
3. Modal yang diperoleh oleh gapoktan unggul makmur	50
4. Usaha yang dilakukan gapoktan unggul makmur.....	50
5. Struktur organisasi perkumpulan gapoktan.....	51
C. Pelaksanaan praktik <i>qardh</i> (hutang piutang).....	51
1. Syarat-syarat berhutang.....	51
2. Tata cara hutang piutang (<i>qardh</i>)	51
3. Tata cara pengembalian hutang piutang.....	52

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG DENGAN TAMBAHAN PEMBAYARAN SEBAGAI JASA DI DESA SRUNI KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis terhadap praktik hutang piutang di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo	54
B. Analisis Hukum Islam terhadap praktik hutang piutang di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.....	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA..... 62

LAMPIRAN

Inilah bukti kesempurnaan ajaran Islam, yang mana didalamnya bukan hanya mengatur *ma'isyah al-akhirah* (kehidupan akhirat) dengan mengkhususkan praktik ubudiyah (peribadatan), tetapi Islam juga mengatur sedemikian rupa bagaimana caranya untuk bisa memenuhi *ma'isyah ad-dunya* (kehidupan dunia). Demikian ini adalah sebagai tanda akan prioritas Islam untuk mengangkat derajat pemeluknya mulai didunia sampai akhirat.

[illegible]

Fikih muamalah tentunya terus berkembang sesuai dengan perkembangan yang dialami manusia itu sendiri. Dengan mengatur bagaimana sendi-sendi kehidupan manusia, yang pada akhirnya Islam sebagai rahmatan lil-‘alamin mampu mengantarkan umatnya pada jalan yang benar dan lurus, tanpa menghalangi perkembangan yang sewajarnya.

Makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, masing-masing bertolong menolong, berhajat kepada orang

[illegible]

lain, saling tukar menukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik dengan cara sewa–menyewa, jual beli, pinjam meminjam atau suatu usaha yang lain yang bersifat pribadi maupun untuk kemaslahatan umat. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur’an dalam Q.S. al–Maidah (5) : 2, sebagai berikut :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.(Q.S. al-Maidah (5) : 2)³

Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan, bahwa secara garis besar fikih muamalah merupakan bentuk ajaran Islam yang mengusung kesejahteraan manusia pada umumnya. Dengan bahasa yang lain, Islam adalah agama yang sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, terbukti dari perhatiannya yang begitu besar terhadap arti keseimbangan, baik dalam batasan pribadi atau dalam cakupan yang lebih luas dalam hubungan antar manusia. Dari sini, mari kembali pada satu ungkapan arab (Islam unggul dan tidak terungguli).⁴

Salah satu bentuk tradisi yang berkaitan dengan muamalah yaitu hutang piutang, dalam bahasa arab disebut *qardh* yang berasal dari kata qarada yang sinonimnya *qatḥ'a* yang berarti memotong. Diartikan

³ Al – Qur'an dan Terjemahan, (Bandung : JABAL, 2010), 106.

⁴ Ibid., 16.

demikian karena orang yang memberikan hutang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima hutang (*muqtarid*).⁵

Hutang piutang (*qard*) adalah salah satu transaksi yang bisa dilakukan seluruh tingkat masyarakat, oleh sebab itu transaksi hutang piutang (*qard*), sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain.⁶

Adapun menurut pendapat para ulama tentang pengertian hutang piutang (*qard*), sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi, hutang piutang (*qard*) adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mithil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya, akad dengan membayarkan harta *mithil* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.⁷
2. Mazhab Maliki, hutang piutang (*qard*) adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.⁸
3. Mazhab Syafi'i, hutang piutang (*qard*) adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.⁹

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 273.

⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajja Grafindo Persada, 2002), 37.

⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 151.

⁸ Abdurrahman al – Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala Mazhab al-Arba’ah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 210.

⁹ Ibid, 210.

4. Mazhab Hambali, hutang piutang (*qard*) adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembaliannya sesuai dengan padanannya.¹⁰

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang sedang membutuhkan, dengan cara memberikan hutang dan hutang bukan merupakan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang dihutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya atau sesuai dan sama dengan nilai yang dihitungnya.¹¹

Dalam bermuamalah tentulah manusia memerlukan aturan yang mana dengan adanya aturan tersebut sangat bermanfaat bagi kelangsungan interaksi antar mereka. Islam datang dengan dasar dan prinsip yang mengatur secara baik persoalan bermuamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.¹² Tanpa terkecuali dengan manfaat hutang piutang (*qard*), dimana pengambilan manfaat dalam hutang piutang (*qard*) hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian.

Untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang setiap warganya juga pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, ada yang kebutuhan

¹⁰ Ibid, 210.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: 2013), 275.

¹² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 6

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan adanya suatu permasalahan dalam penelitian dengan melakukan identifikasi sebanyak mungkin yang dapat diduga sebagai masalah.¹³ Pembatasan masalah dimaksudkan untuk memperjelas ruang lingkup masalah serta pembahasannya pun menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan penulis bahas. Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas terdapat poin-poin yang diindikasikan sebagai masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- [illegible]

3. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap praktik qard}(hutang-piutang) dalam hukum Islam.
4. Faktor sosial dan ekonomi masyarakat terhadap hutang- piutang.
5. Diberikannya bonus setelah pembayaran hutang-piutang berakhir.
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN/MUI/IV/2001 tentang *al-Qard}*
7. Praktik hutang piutang (*qard}*) yang merugikan salah satu pihak.
8. Praktik hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni, Gedangan, Sidoarjo.
9. Hukum Islam terhadap praktek hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa.

Agar pembahasan karya tulis ini fokus sesuai identifikasi masalah tidak meluar dan keluar dari pembahasan, maka penulis perlu memberikan batasan masalah yang akan dibahas oleh penulis, batasan-batasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Praktik hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni, Gedangan, Sidoarjo.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni, Gedangan, Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

- #### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penjelasan ringkas terkait dengan kajian/penelitian yang pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga nampak jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan plagiasi atau dipublikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.¹⁴

Sebelumnya penulis telah melakukan perbandingan antara penelitian-penelitian yang terdahulu diantaranya yaitu :

Pertama skripsi dari saudara Ridho Okta Aditya mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2019 yang berjudul, “Peranan Pembiayaan Qard}Al-Hasan terhadap Peningkatan Usaha Anggota Koperasi Syariah Harapan Surabaya” Fokus skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab para anggota untuk melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan

[illegible]

Kedua skripsi dari saudara Yunita Astuti mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2018 yang berjudul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Gabah Dengan Tambahan Sedekah di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun” Fokus skripsi ini membahas mengenai praktik hutang piutang gabah yang dilakukan oleh si penghutang terhadap takmir masjid sebagai si pemberi hutang, dimana setiap bagian gabah yang dihutangkan kepada si penghutang akan dikembalikan dengan penambahan minimal 5 Kg gabah atau kelipatannya jika tidak dapat membayar saat waktu jatuh tempo sebagai sedekah. Sedangkan teori yang digunakan yaitu menggunakan teori *qardh* (hutang-piutang).

[illegible]

Berangkat dari beberapa penelitian diatas, maka dalam penelitian ini penulis akan fokus pada analisis hukum Islam terhadap praktik *qardh* dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Dimana penulis disini akan menggunakan teori *qardh* dalam penelitiannya.

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan diatas, tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah :

- [illegible]

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep penelitian, yang berguna untuk memperjelas dan mempertegas penulis dan bukan kata perkata.¹⁵

- 1) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2002.
- 2) Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, 2017.
- 3) Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 2002.
- 4) Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, 2001.
- 5) Wahbah az – Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, 2011.
- 6) *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2010.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

¹⁹ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 213

5. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

b. Organizing

²³ Raco J. R., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 243

c. Analyzing

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yakni dengan memaparkan serta menjelaskan data-data yang diperoleh dari lapangan berupa hasil

73

wawancara dan dokumentasi secara mendalam, dengan menggunakan pola pikir deduktif yang berangkat dari ketentuan umum dalam penelitian ini yaitu menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan teori yang berkaitan dengan praktek hutang piutang (*qard*) dalam hukum Islam yang selanjutnya dipakai untuk menganalisis hutang piutang (*qard*) dengan tambahan pembayaran sebagai jasa, kemudian menganalisis faktanya dilapangan dengan menggunakan teori tersebut untuk mendapatkan kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan penelitian yang dibuat penulis ini, maka penulis membagi beberapa sub bab yang terdiri dari 5 (lima) bab, sebagai berikut:

Bab pertama merupakan Pendahuluan, yakni mencakup tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori dari praktik hutang piutang (*qard*) dengan tambahan pembayaran sebagai jasa. Landasan teori ini berisi hasil cakupan dari beberapa literatur untuk membuka wawasan dan cara berpikir dalam memahami serta meninjau fenomena yang ada, bab ini berisi teori – teori yang meliputi: pengertian hutang piutang (*qard*) dalam hukum Islam, dasar hukum hutang piutang (*qard*), rukun dan syarat

Bab ketiga merupakan gambaran umum Desa Sruni yang meliputi, aspek geografis, aspek demografi, suasana kehidupan beragama, aspek sosial ekonomi, serta praktik hutang piutang (*qard*) dengan tambahan pembayaran sebagai jasa yang mmeliputi, latar belakang adanya penambahan pembayaran sebagai jasa dan pendapat warga dan tokoh agama tentang hutang piutang (*qard*) dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Bab ini merupakan data yang diperoleh dari lapangan yang kemudian digunakan sebagai acuan untuk menganalisis pada bab IV.

Bab kelima ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang dibuat oleh penulis, yang mana dalam bab ini pembahasannya memuat kesimpulan dari uraian jawaban dalam rumusan masalah serta saran–saran dari pembahasan tersebut.

BAB II

HUTANG PIUTANG (*QARD*) DAN RIBA

A. Hutang Piutang (*Qard*)

1. Definisi hutang piutang (*qard*)

Qard dalam arti bahasa berasal dari kata *qarada*, dan sinonimnya adalah *qatḥ'a* yang berarti memotong. Dapat diartikan demikian sebab orang yang memberikan hutang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang telah menerima hutang (*muqtarid*).²⁷

Adapun *qardh* secara terminologis yaitu memberikan harta kepada orang yang hendak memanfaatkannya dan mengembalikannya dikemudian hari.

Secara istilah menurut hanafiyah, *qardh* ialah harta yang memiliki kesepadanan yang di berikan untuk dapat ditagih kembali. Atau dengan kata yang lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memrikan harta yang memiliki kesepadanan terhadap orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.²⁸

Menurut Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *qard* secara bahasa sebagai potongan, maksudnya adalah harta yang dipinjamkan kepada

²⁷ Muhamad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 70.

seseorang yang membutuhkan. Harta tersebut merupakan potongan atau bagian dari harta orang yang telah memberikan pinjaman tersebut.²⁹

Definisi *qard* secara umum menurut para Ulama yaitu, harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang (debitor) kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikan dengan nilai yang sama.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 *qardh* didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.³⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa *qardh* yaitu pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjam tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya. *Qardh* juga tidak berbungan, karena prinsip dalam *qardh* ini adalah tolong menolong.³¹ Berdasarkan firman Allah yang terdapat dalam surat al – Maidah (5) ayat 2:

²⁹ Wahbah az – Zuhaili, *Al – Fiqh al – Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al – Fikr, 1985), 720.

³⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (36).

³¹ Imam Mustofa, *Figih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 169.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “...Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan tqwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan” (QS. Al-Maidah (5) : 2)³²

2. Landasan Hukum

Qardh dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.³³

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يَقْرُضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak” (QS. Al – Baqarah (2) : 245)³⁴

Firman Allah dalam surat al-Maidah (5) ayat 12 :

...لَعَنَ أَقْمَتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ...

Artinya :“...Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul–Rasul Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik; Sesungguhnya Aku akan menutup dosa–dosamu. Dan Sesungguhnya kamu akan Kumusnahkan kedalam surga yang mengalir air

³²Al – Qur'an dan Terjemahan, (Bandung : JABAL, 2010), 106.

³³ Ibid, 169.

³⁴Al – Qur'an dan Terjemahan, (Bandung : JABAL, 2010), 39.

Shighat adalah ijab dan kabul.

b. 'Aqidain

'*Aqidain* adalah dua orang pihak yang melakukan transaksi yaitu, pemberi hutang dan penerima hutang. Adapun syarat–syarat bagi penerima hutang adalah :

- 1) Merdeka.
- 2) *Baligh*.
- 3) Berakal sehat.
- 4) Pandai (*rasyid*, dapat membedakan baik dan buruk).

c. Harta yang dihutangkan

- 1) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya adalah harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda, yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditukar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
- 2) Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa).
- 3) Harta yang dihutangkan diketahui, maksudnya yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

4. *Qard* yang mendatangkan keuntungan

a. Tidak mendatangkan keuntungan.

b. Akad *qardh* tidak dibarengi dengan transaksi lain.

“Tidak dibolehkan utang bersama jual beli.”

⁴¹ Wahbah Az – Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (terjemahan)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 379.

5. Tambahan dalam pengembalian pembayaran hutang

Oleh sebab itu, diharamkan bagi pemberi hutang mensyaratkan tambahan dari hutang yang ia berikan kepada penghutang ketika hendak mengembalikan hutangnya. Para ulama telah bersepakat bahwa, jika pemberi hutang mensyaratkan untuk adanya tambahan dan si penghutang menerimanya, maka itu termasuk dalam riba.⁴²

Dalam hal tersebut Nabi Muhammad Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْزُوقِ بْنِ جَبِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ قَرَضٍ ضَجْرٌ مُنْفَعَةٌ فَهُوَ وَجْهُهُمْ وَجْهُ الرَّبِّ

⁴² Saleh al – Fauzan, *al – Mulakhasul Fiqhi*, Cet. 1, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), 411.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Garis – Garis Besar Fiqih Jilid 1*, (Jakarta : Pena Media, 2003), 224.

“Dari Abu Hurairah r.a berkata : “Rasulullah Saw. berhutang seekor unta, dan mengembalikannya sebagai bayaran yang lebih baik dari unta yang diambilnya secara hutang dan beliau bersabda : “ Orang yang lebih baik diantara kamu adalah orang yang paling baik pembayarannya”. (HR. At-Turmudzi).

[illegible]

Dalam literatur fikih Islam yang menjelaskan tentang riba pada umumnya menjelaskan tentang perbedaan pendapat para ulama dalam menyebutkan bentuk-bentuk riba. Sebagian para ulama menyebutkan macam-macam riba itu ada 2 (dua) yaitu, riba fadhhl dan riba nasi'ah. Sebagian lagi para ulama yang lain menyebutkan macam-macam riba itu ada 3 (tiga) yaitu, riba fadhhl, riba nasi'ah, dan riba yad. Sebagian para ulama juga menyebutkan macam – macam riba ada sharf dan nasa'.

Jika merujuk pada dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an dan as Sunnah, dapat disimpulkan bahawa macam-macam riba ada 2 (dua) yaitu, riba qardh dan riba buyu'. Dalam riba buyu' sendiri mencakup riba al-fadhl dan riba nasi'ah.

Dalil-dalil dalam Al-Qur'an, Al-Hadis dan sirah yang menguatkan kesimpulan diatas adalah sebagai berikut :⁴⁴

1. Dalil-dalil Al-Qur'an

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya : “Allah Swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”(QS. Al – Baqarah (2) : 275).⁴⁵

⁴⁴Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah – kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 2.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah SWT., dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”(QS. Al-Baqarah (2) : 278).⁴⁶

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah SWT., supaya kamu mendapat keberuntungan.”(QS. Ali Imran (3) : 130).⁴⁷

Adapun hadis–hadisnya sebagai berikut :

Bersabda : (penukaran) antara emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, korma dengan korma, garam dengan garam itu harus sama dan dibayar kontan. Jika berbeda (penukaran) barang diatas, maka jual lah barang tersebut sekehendak kamu sekalian dengan syarat dibayar kontan.” (HR Ahmad).

“Dari Ibnu Umar, dia berkata : “Saya pernah menjual unta di Baqi’ saya menjualnya dengan beberapa dirham (sebagai pengganti dirham, pen.)” kemudian saya datang menemui Nabi Saw. Di rumah

⁴⁸Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah – kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 3.

Dalam sirah, riba *qard* sering juga disebut riba jahiliah atau dalam tafsir sering disebut dengan riba nasi'ah.⁴⁹ Jadi, riba jahiliah, riba nasi'ah dan riba *qard* itu maknanya sama. Sebagian para ulama yang menyebutkan riba *sharf* itu sesungguhnya bagian dari riba *buyu'* sebab *sharf* adalah jual beli. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa riba jahiliah dan riba nasi'ah itu sesungguhnya kedua lafaz dari nama lain riba *qard*.

[illegible]

Riba qard}bisa juga disebut riba nasi'ah dan riba duyun. Nasi'ah sendiri memiliki artingan yaitu, penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah ini muncul sebab adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian.

Jadi, *al-ghunmu* (untung) muncul tanpa adanya *al-ghurmu* (risiko), *al-kharraj* (hasil usaha) muncul tanpa adanya *dhaman* (biaya); *al-ghunmu* dan *al-kharraj* dapat muncul hanya dengan berjalannya waktu.

Padahal dalam suatu bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu di luar wewenang manusia adalah bentuk kezaliman. Hal tersebut justru yang terjadi dalam riba nasi'ah yaitu, terjadi perubahan sesuatu yang seharusnya *uncertain* (tidak pasti) menjadi *certain* (pasti).⁵²

⁵²Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kidah – kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 6.

Memberikan pinjaman adalah transaksi kebaikan (*tabarru'*), sedangkan meminta kompensasi itu adalah transaksi bisnis (*mu'awadhat*). Jadi, transaksi yang dari semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh dirubah menjadi transaksi bermotif bisnis.⁵³

Sebagai contoh : Pak bahrul meminjamkan uang 1 juta kepada Bu Aida, dengan kesepakatan Bu Aida akan membayar 1 juta 500 ribu rupiah. Uang 500 ribu rupiah tersebut yang telah dibayarkan adalah termasuk *riba qard* sebab hal itu terjadi dalam simpan pinjam.

Sekilas *qardh* (pinjaman) mirip dengan *bai' at-taqsith* (*bai' muajjal*/jual beli kredit). Sebab, kedua hal tersebut terdapat tambahan dari pokok modal, dalam *bai' taqsith*, harga cicilan (kredit) lebih besar daripada pokok modal yang diberikan.

[illegible]

Dari sisi perpindahan kepemilikan dalam jual beli barang, menjadi milik pembeli selamanya (*muabbad*). Tetapi dalam *qardh* pinjaman tidak menjadi milik peminjam, melainkan tetap menjadi milik pihak yang telah meminjamkan. Oleh sebab itu, peminjam harus mengembalikannya kepada pihak yang meminjamkan itu.

Dari sisi pengelompokkan akad, jual beli adalah akad bisnis (*mu'awadhat*), oleh sebab itu harus ada kompensasi dan imbalan, sedangkan akad *qardh* adalah akad sosial (akad tabarruat) yang tidak ada kompensasi atau imbalan.⁵⁴

Riba qard}(riba jahiliah/riba nasi'ah) diharamkan menurut Al-Qur'an dan ijma' ulama. Oleh sebab itu, seluruh ulama tanpa terkecuali telah sepakat bahwa *riba qard* itu diharamkan

[illegible]

a.) Al – Qur'an

Artinya :“Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah SWT., telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah (2) : 275).⁵⁶

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah SWT., dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah (2) : 278).⁵⁷

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT., supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali Imran (3) : 130).⁵⁸

⁵⁸Al – Qur'an dan Terjemahan, (Bandung : JABAL, 2010), 66.

Seperti dalam ayat pertama, *wa ahhallallahul bai' a wa harramar riba*, riba disini dimaksudkan adalah riba *qard* sebab jika yang dimaksud adalah riba buyu' (jual beli) maka akan terjadi pengulangan makna, sebab bai' (jual beli) telah disebutkan sebelumnya. Begitu pula dengan lafaz riba yang ada dalam ayat kedua dan ketiga.

Para ulama telah berkonsensus bahwa riba *qard* itu diharamkan dalam Islam dan termasuk riba jahiliah sesuai dengan kaidah fikih:

Oleh sebab itu, berdasarkan dalil–dalil yang sudah disebutkan diatas adalah yang shahih dan sharih (jelas dan tegas) menunjukkan bahwa riba *qard* (riba jahiliyah/riba nasi'ah) ini termasuk *tsawabit* dan *qath'iyat* (hal yang prinsipil dan fundamental) dalam agama Islam.⁶⁰

⁵⁹ Ibid, 10.

⁶⁰ Ibid, 11.

Jika kita pahami, hadis tersebut menjelaskan tentang dua kelompok barang-barang ribawi (*amwal ribawiyat*), kelompok yang pertama adalah mata uang atau uang, kelompok yang kedua adalah makanan.

Kemudian para ulama berbeda-beda menentukan ‘Illat dari kedua jenis barang ribawi tersebut. Dalam penjelasan para ulama kontemporer, dapat disimpulkan bahwa pendapat yang kuat yaitu :⁶²

⁶²Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kidah – kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 30.

“Terwujudnya Desa Sruni Mandiri dan sejahtera ”. dan mempunyai slogan “Nyawiji Mbangun Desa”

a. Mandiri

b. Sejahtera

Dari uraian tersebut diatas, maka ketercapaian visi Kepala Desa dapat diuraikan sebagai berikut :

- [illegible]

Kemudian jarak Desa Sruni menuju ke Kecamatan Gedangan kurang lebih 0,5 Km dimana dapat ditempuh dengan kendaraan kurang lebih 5 menit. Untuk jarak Desa Sruni menuju ke Kabupaten Sidoarjo kurang lebih 10 Km dimana dapat ditempuh dengan kendaraan kurang lebih 20 menit. Batas wilayah Desa Sruni sendiri terdiri dari, sebelah utara berbatasan dengan Desa Gedangan, sebelah barat berbatasan dengan Desa Ganting, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tebel, dan untuk sebelah timur berbatasan dengan Desa Punggul.

Desa Sruni mayoritas penduduknya beragama Islam, menurut data yang ada kurang lebih 99% dan kegiatan keagamaan yang masih dilakukan yaitu seperti pengajian mingguan dan bulanan seperti, yasinan dan tahlilan.

1. Sejarah Perkumpulan Gapoktan Unggul Makmur

[illegible]

Perkumpulan Gapoktan “Unggul Makmur” Sruni, berazaskan kekeluargaan dan gotong royong.

Prinsip-prinsip dari Perkumpulan Gapoktan “Unggul Makmur” Sruni, yaitu : keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan usaha dilakukan secara berkelompok, berdasarkan hasil musyawarah secara demokratis, didasarkan pada prinsip kemandirian dan kerjasama antar lembaga.

Tujuan Gapoktan : memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya petani dalam upaya peningkatan produksi usaha tani, peningkatan pendapatan serta kesejahteraan petani; meningkatkan kemandirian petani dalam pengelolaan usaha tani, permodalan, pengelolaan dan pemasaran hasil; meningkatkan kerjasama dan kemitraan antar lembaga petani, swasta, maupun pemerintah.

Berangkat dari sini para pengurus Gapoktan ini menerima dana tersebut untuk warga Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Karena, di Desa Sruni ini sudah tidak terdapat persawahan sehingga mata pencaharian warga di Desa Sruni bukan sebagai petani. Sehingga para pengurus Gapoktan ini menggunakan dana ini untuk membantu warga desa Sruni yang memiliki usaha – usaha, contohnya seperti jual sembako dan usaha yang lainnya.

Syarat-syarat menjadi anggota di Gapoktan

- Dewasa/*baligh* (sudah bekerja/mempunyai usaha).
- Sehat jasmani dan rohani.
- Warga Sruni

Modal yang diperoleh dari Gapoktan

- Simpanan pokok anggota
- Simpanan wajib anggota
- Iuran anggota
- Bantuan pemerintah
- Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat
- Kredit dari pemerintah, perbankan maupun swasta

Usaha yang dilakukan Gapoktan

- Unit usaha tani meliputi usaha tani yang menguntungkan berdasarkan teknologi, permodalan, sarana produksi dan sumberdaya alam yang dimiliki.
- Unit usaha pengolahan hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan oleh Gapoktan maupun kemitraan dengan pihak lain.
- Unit usaha sarana dan prasarana produksi.

- Kesepakatan itu terdiri dari: ingin meminjam uang sejumlah berapa (maks. 5 juta rupiah), cicilan yang harus dibayarkan, dan tambahan pembayaran sebagai jasa yang harus dibayarkan. Jika, kedua belah pihak saling menyetujui, maka ketua Gapoktan akan menuliskan hutang tersebut pada buku khusus hutang piutang yang ada.⁶⁵

Pengembalian hutang piutang dilakukan secara menyicil disetiap bulannya oleh para anggota yang berhutang membayar kepada ketua Gapoktan (Bapak Suwarno) di kediaman ketua Gapoktan (Bapak Suwarno) tersebut. Ketentuan cicilan tersebut rata-rata dilakukan dalam jangka waktu satu tahun.⁶⁶

- ⁶⁴ Suwarno, *Wawancara*, Sidoarjo, 09 Juni 2019.
⁶⁵ Mariati, *Wawancara*, Sidoarjo, 30 Mei 2019.
⁶⁶ Ayu, *Wawancara*, Sidoarjo, 29 Mei 2019.

pembayaran sebagai jasa itu diambil untuk mengembangkan dana pemerintah yang telah diberikan kepada pengurus GAPOKTAN serta diberikan untuk para anggota secara merata.⁶⁷

c. Setelah para anggota yang meminjam sejumlah uang tersebut sudah melunasi hutang piutang nya. Para anggota yang meminjam sejumlah uang tadi akan diberikan *fee*. Hal tersebut dilakukan untuk menarik minat para anggota yang ingin meminjam.⁶⁸

Dari hasil wawancara diatas, penambahan pembayaran hutang piutang tersebut adalah atas kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan, dimana praktik tersebut masih berlanjut hingga saat ini karena dirasa oleh para anggota yang tergabung bahwa hutang piutang disini yang penambahan pembayarannya tidak terlalu banyak.

Berikut adalah data hutang piutang :

No.	Nama	Jumlah Hutang	Tenor	Jumlah angsuran	Jumlah Jasa	Keperluan
1.	Bapak Imam	2.000.000	10 kali	200.000	40.000	Untuk mengembangkan usaha
2.	Ibu Mariati	2.000.000	10 kali	200.000	40.000	Untuk mengembangkan usaha
3.	Ibu Ayu	5.000.000	10 kali	500.000	100.000	Untuk mengembangkan

⁶⁷ Suwarno, *Wawancara*, Sidoarjo, 09 Juni 2019.

⁶⁸ Imam, *Wawancara*, Sidoarjo, 27 Mei 2019.

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG
PIUTANG DENGAN TAMBAHAN PEMBAYARAN SEBAGAI
JASA DI DESA SRUNI KECAMATAN GEDANGAN
KABUPATEN SIDOARJO**

Berdasarkan praktik transaksi yang terjadi antara pemberi hutang (*muqrid*) dan penerima hutang (*muqtarid*) adalah praktik hutang piutang (*qard*). Hutang piutang (*qard*) tersebut terjadi di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang telah menyepakati pengembalian hutang piutang (*qard*) dengan tambahan pembayaran sebagai jasa.

55

Masyarakat di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo melakukan transaksi hutang piutang di rumah pemberi hutang yang dalam hal ini adalah ketua Gapoktan. Mereka mendatangi rumah ketua Gapoktan dengan maksud meminta tolong untuk memberikan hutang sejumlah uang yang akan dipergunakan dan akan dikembalikan hutang tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dan berdasarkan waktu tertentu.

Ketentuan-ketentuan yang ada telah menjadi kesepakatan bersama seluruh pengurus dan para anggota yang tergabung di Gapoktan tersebut. Hal tersebut dilakukan supaya tidak ada kesalah pahaman dikemudian hari. Jadi, dari ketentuan-ketentuan yang telah dibuat sudah tidak ada yang saling keberatan. Karena semua ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat itu dibicarakan bersama-sama mengenai bagaimana pembayarannya, berapa kali cicilan yang akan dibayarkan, serta jumlah tambahan pembayaran sebagai jasa yang harus dibayar. Semua itu telah mencapai kesepakatan dari pengurus serta seluruh anggota yang tergabung di dalam gapoktan tersebut.

Sesuai dengan praktik hutang piutang yang terjadi, setelah pihak yang mau meminjam uang menjelaskan maksud datang ke rumah ketua Gapoktan untuk berhutang, barulah ketua Gapoktan menjelaskan syarat-syarat dan ketentuan yang harus ditepati. Setelah terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak, maka terjadilah ijab dan kabul. Keseringan yang terjadi antara ketua gapoktan dan penerima hutang melakukan ijab dan

Praktik ijab kabul dengan cara tersebut tidak bertentangan dengan *shara'* sebab dalam Islam pelaksanaan *sighat* dapat dilakukan dengan bermacam cara, yakni lisan, tertulis, isyarat maupun secara perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan. Sehingga ijab dan kabul yang telah dilakukan oleh ketua Gapoktan dengan penerima hutang tersebut adalah ijab kabul yang sah karena sudah menjadi kebiasaan serta dalam hal ini sudah sama-sama menunjukkan kerelaan antar kedua belah pihak, meskipun dilakukan dengan cara saling memberi dan menerima tanpa diikuti kata-kata.

Buku khusus hutang piutang tersebut berbentuk seperti buku tabungan di bank. Jadi, bukunya dipergunakan setiap membayar cicilan hutang ke ketua gapoktan. Dalam buku khusus hutang piutang tercantum tanggal pinjaman, pokok pinjaman, angsuran, tanggal angsuran, tambahan pembayaran jasa, serta tanda tangan ketua Gapoktan.

[illegible]

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa hutang piutang (*qard*) yang terjadi dalam perkumpulan Gapoktan yang terletak di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo adalah hutang piutang (*qard*) yang dilakukan antara pengurus Gapoktan dan seluruh anggota yang ada dalam perkumpulan Gapoktan ini. Dimana salah satu persyaratan yang harus dilakukan yaitu dengan mengembalikan uang yang telah dipinjam beserta tambahan pembayaran sebagai jasanya.

Hal ini bisa dikatakan sebagai transaksi hutang piutang (*qardh*) sebab secara praktik yang ada dari kebanyakan masyarakat menggunakan kata-kata, “ Pak, saya mau hutang sejumlah ...” kepada ketua Gapoktan. Jika transaksi tersebut termasuk dalam hutang piutang (*qardh*), maka perlu diketahui terlebih dulu mengenai apa saja yang menjadi rukun dan syarat dari hutang piutang (*qardh*). Adapun rukun hutang piutang (*qardh*) adalah:

- [illegible]

hukumnya haram sebab hutang piutang (*qard*) merupakan akad yang murni karena Allah serta dalam transaksi tersebut kita sebagai *muqtarid* (yang memberikan hutang) yaitu, Gapoktan yang diwakili Bapak Suwarno selaku ketua Gapoktan tidak boleh mengharap imbalan apapun.

3. Syarat dan rukun dalam ijab dan kabul ini sudah sesuai menurut akad *qard* }

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dilihat dari analisis yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulannya sebagai berikut :

1. Praktik hutang piutang (*qard*) dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo terjadi ketika *muqtarid* (penerima hutang) yaitu, anggota dari Gapoktan datang kepada *muqrid* (pemberi hutang) yaitu, dari Gapoktan yang diwakili Bapak Suwarno selaku sebagai ketua Gapoktan untuk melakukan pinjaman. Kemudian, kedua belah pihak mengadakan ijab dan kabul secara lisan dan tertulis. Dalam hal ini, kedua belah pihak sama-sama saling mengetahui bahwa setiap melakukan pinjaman akan dikenakan tambahan pembayaran sebagai jasa, dimana hal tersebut sudah ada dalam kesepakatan yang dilakukan oleh para pengurus serta seluruh anggota yang ada dalam perkumpulan Gapoktan tersebut.
2. Praktik hutang piutang (*qard*) dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang sudah dipaparkan di bab sebelumnya, maka penulis memperoleh kesimpulan bahwa praktik hutang piutang dengan tambahan

- Arsoy, Yono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, XIV
- Parsono, Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Wati. 2019. *Wawancara*. Sidoarjo: Graha Ilmu
- Arno. 2019. *Wawancara*. Sidoarjo: Graha Ilmu
- ei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- ifuddin, Amir. 2003. *Garis – Garis Besar Fiqih Jilid 1*. Jakarta : Penerbit Al-Furqan
- Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. 2014. *Petunjuk Teknis Penyusunan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press
- di Muslich, Ahmad. 2013. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah
- d, Muhamad. 2014. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: Sunan Ampel Press
- if Chudlori, Muhammad. 2015. *FIKIH SOSIAL PRAKTIK PESANTREN*. Bandung: PENERBIT MARJA